

**MEKANISME PENGAWASAN PEMBIAYAAN
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS BMT)
DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Kepada STAIN Pekalongan
Dalam Rangka untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) di Bidang
Ilmu Perbankan Syariah**



Oleh:

MEISILA LINTANG RIYANA

NIM: 231 208 062



PROGRAM STUDI D III PERBANKAN SYARIAH

JURUSAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PEKALONGAN

2011

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meisila Lintang Riyana
NIM : 231 208 062
Jurusan/Prodi : Syariah/D III Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Pengawasan dalam Pembiayaan bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, kiranya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 15 Oktober 2011

Deklarator,


Meisila Lintang Riyana

NIM. 231 208 062

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Naskah Tugas Akhir

Sdri. Meisila Lintang Riyana

Kepada Yth.

Bapak Ketua STAIN Pekalongan

C.Q. Ketua Jurusan Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudara/i:

Nama : Meisila Lintang Riyana

NIM : 231 208 062

Program Studi : D3 Perbankan Syariah Jurusan Syariah

Judul : **MEKANISME PENGAWASAN DALAM PEMBIAYAAN
BAGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS
BMT) DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG
PEKALONGAN**

Dengan ini saya mohon agar Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan).

Demikian, harap menjadi perhatian dan disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 04 Oktober 2011

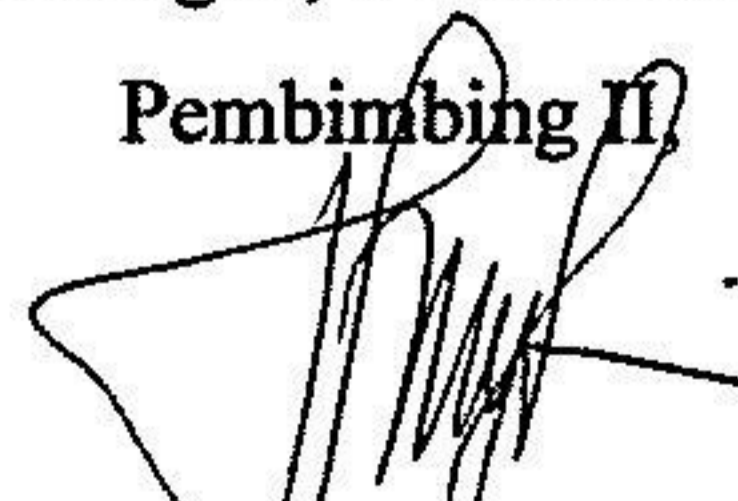
Pembimbing I,



Ali Trigiyatno, M.Ag

NIP. 1976 10 16 200212 1008

Pembimbing II,



Rinda Asytuti, M.Si

NIP. 1977 12 06 200501 2002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jln. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Email : stainpkl@telkom.net – stainpkl@hotmail.com


PENGESAHAN


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, mengesahkan Tugas Akhir saudara :


Nama : **MEISILA LINTANG RIYANA**
NIM : **231 208 062**
Judul Tugas Akhir : **“MEKANISME PENGAWASAN PEMBIAYAAN
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
(LKMS BMT) DI BANK MUAMALAT INDONESIA
CABANG PEKALONGAN”**

Yang telah diujikan oleh Dewan Penguji pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011, dinyatakan lulus serta dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,


Maghfur, M.Ag
Penguji I


Ahmad Syukron, M.Ei
Penguji II

Pekalongan, 27 Oktober 2011
Ketua STAIN Pekalongan

DR. Ade Ded Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

MOTTO

“Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Jika kita mencintai apa yang kita kerjakan, maka kita akan meraih kesuksesan”

KATA-KATA MUTIARA

“Kekayaan tidak dilihat dari melimpahnya harta, tetapi dari perasaan berpuas diri”

(Nabi Muhammad SAW)

“Luck is where preparation and opportunity meet”

(William D. Bygrave)

“Ketika kau melihat seseorang yang diberi titipan harta dan keadaan yang lebih baik dari pada dirimu, lihatlah mereka yang diberi lebih sedikit oleh Allah”

(Nabi Muhammad SAW)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil ini untuk:

- 1. Allah SWT*
- 2. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa mendoakan saya*
- 3. Kakakku, Ronaldo Rolan*
- 4. Sahabatku, Ifa, terima kasih atas doronganmu selama ini*
- 5. Seluruh teman-teman D III angkatan 2008, semoga kita sukses selalu*

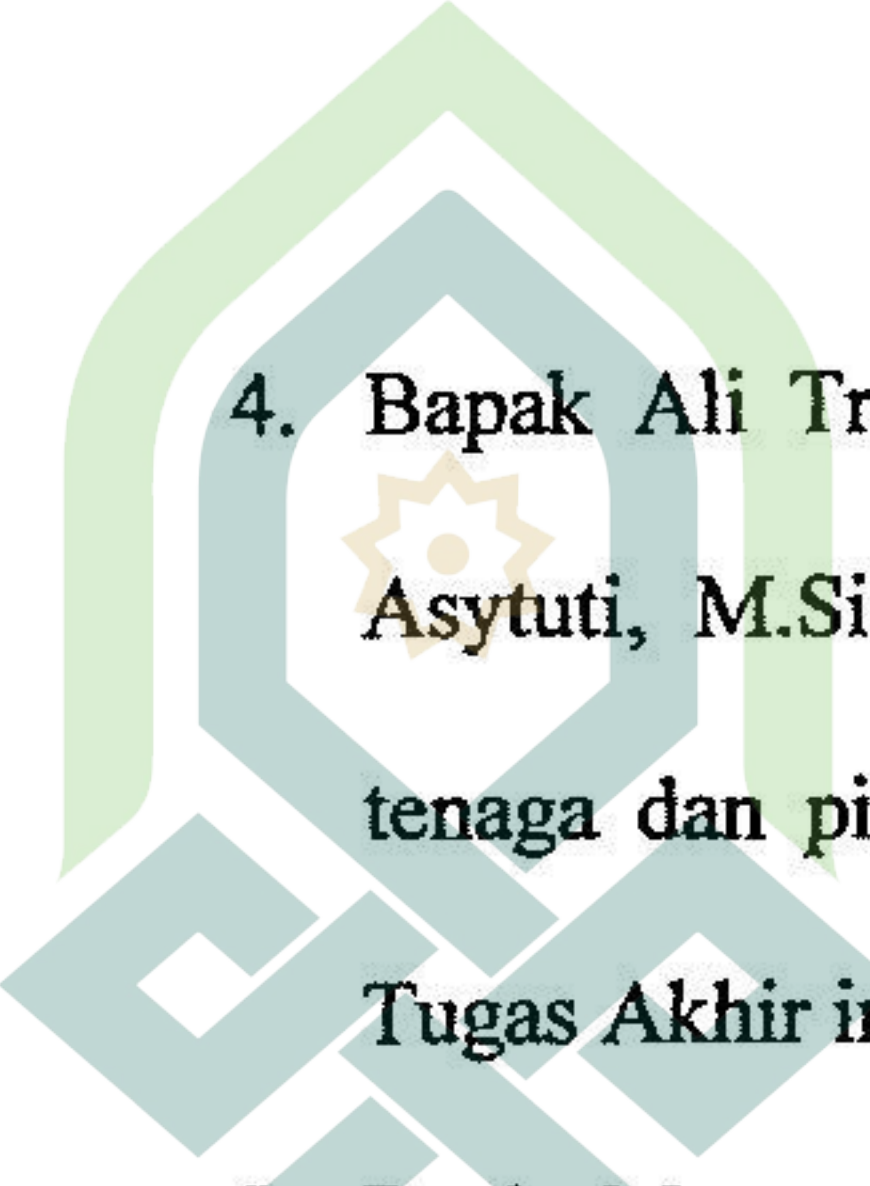

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melalui berbagai tantangan, merangkai dan mencoba menguak sebagian kecil Ilmu Allah di dunia ini dalam bentuk penulisan Tugas Akhir yang berjudul “MEKANISME PENGAWASAN PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS BMT) DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEKALONGAN”. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang darinya penulis memperoleh tauladan serta inspirasi.

Adapun Tugas Akhir yang penulis susun ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Diploma III dalam Ilmu Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan maupun saran dan kritik dalam rangka menambah ilmu ataupun penyempurnaan Tugas Akhir ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada tara penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Ketua STAIN Pekalongan
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syariah
3. Bapak Ahmad Syukron, M.Ei., selaku Ketua Prodi D III Perbankan Syariah dan Dosen Wali

- 
- 
4. Bapak Ali Trigiyatno, M.Ag., selaku pembimbing pertama dan Ibu Rinda Asytuti, M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan dan arahan dalam penulisan Tugas Akhir ini
 5. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan yang telah memberi izin tempat penelitian
 6. Seluruh civitas akademika STAIN Pekalongan
 7. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan moril maupun materiil serta doa restunya
 8. Sahabat-sahabat D III dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca yang budiman.

Pekalongan, Oktober 2011

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DEKLARASI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT).....	21
1. Pengertian LKMS BMT.....	21
2. Ciri-ciri LKMS BMT.....	21
3. Alasan Pendirian LKMS BMT.....	22
4. Proses Pendirian LKMS BMT.....	23
B. Tinjauan Umum Pembiayaan.....	25
1. Definisi dan Landasan Syariah Pembiayaan.....	25
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	26
3. Jenis-jenis Pembiayaan.....	32
C. Tinjauan Umum Pengawasan Pembiayaan.....	39
1. Pengertian Pengawasan Pembiayaan.....	39
2. Dasar Hukum Pengawasan Pembiayaan.....	40
3. Fungsi dan Tujuan Pengawasan Pembiayaan.....	41
4. Proses dan Jenis Pengawasan Pembiayaan.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEKALONGAN.....	45
A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan....	45
B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.....	50
C. Lokasi PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.....	50

D. Jenis-jenis Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.....	51
E. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan..	63
F. Proses Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan bagi LKMS BMT di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.....	65

BAB IV ANALISIS MEKANISME PENGAWASAN PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS BMT) DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEKALONGAN.. 67

A. Konsep Penyaluran Pembiayaan LKMS BMT di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.....	67
B. Tujuan dan Manfaat selama Diadakannya Pengawasan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT).....	76
C. Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.....	76

BAB V PENUTUP.....	87
A. Simpulan.....	87
B. Saran-saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan...	63
Tabel 4.1 Jumlah Hari Tunggakan dan Penggolongan <i>Collectibility</i>	78

ABSTRAK

Nama : Meisila Lintang Riyana
NIM : 231 208 062
Judul : MEKANISME PENGAWASAN PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS BMT) DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEKALONGAN

Usaha skala Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting sebagai sumber utama lapangan kerja dan pendapatan di negara-negara sedang berkembang. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM, antara lain terbatasnya modal yang dimiliki, dan terbatasnya atau belum mempunyai akses kepada perbankan. Permasalahan tersebut harus dicarikan solusi/alternatif pemecahannya. Melalui program *linkage* dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT), karena selama ini LKMS menjadi tumpuan bagi para pelaku UMKM untuk mencari dan menambah modal. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas pembiayaan, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, termasuk di dalamnya pembiayaan bagi LKMS BMT. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan atau pemantauan jalannya pembiayaan tersebut agar pembiayaan yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan terhindar dari penyelewengan-penyelewengan yang menyebabkan kredit macet.

Di dalam Tugas Akhir ini terdapat satu rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis untuk memperkaya dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan mekanisme pengawasan pembiayaan LKMS BMT, sedangkan secara praktis penelitian ini berguna untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan, dimana objeknya Lembaga Keuangan pada BMI kantor Cabang Pekalongan. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara/*interview*, dokumentasi dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan analisa kualitatif atau analisa deskriptif.

Hasil Penelitian ini adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BMI Cabang Pekalongan terhadap pembiayaan bagi LKMS BMT. Pengawasan yang dilakukan setelah pembiayaan tersebut terealisasi yaitu dengan cara melihat tingkat *collectibility*, monitoring langsung ke nasabah melalui *inspeksi on the spot*, dan meminta laporan berkala. Sejalan dengan tugas pengawasan adalah langkah *approach* dan pembinaan terhadap debitur. Tujuan akhir dari itu semua tentunya agar kerja sama antara BMI Cabang Pekalongan dengan LKMS BMT bisa saling menguntungkan, tidak hanya bagi BMI saja tetapi juga bagi LKMS BMT supaya LKMS BMT bisa lebih berkembang sehingga bisa lebih memberdayakan para pelaku UMKM.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang sudah banyak diketahui, usaha skala Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih tahan terhadap krisis dan mempunyai peran penting sebagai sumber utama lapangan kerja dan pendapatan di negara-negara sedang berkembang. Di Indonesia sendiri, beberapa studi juga mengungkap pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa UMKM sangat penting untuk peningkatan lapangan kerja.¹

Meskipun demikian, ada beberapa hal yang menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM, antara lain terbatasnya modal yang dimiliki, dan terbatasnya atau belum mempunyai akses kepada perbankan. Hal ini merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM karena lembaga-lembaga keuangan formal ragu untuk mengucurkan pinjaman kepada mereka. Setidaknya ada dua alasan kenapa lembaga-lembaga keuangan formal ragu untuk memberikan pinjaman kepada UMKM. Pertama, bahwa lembaga keuangan formal (bank) menganggap jaminan yang diberikan oleh pengusaha-pengusaha kecil tidak layak. Hal ini terjadi karena keadaan produksi pengusaha kecil sering kali berisiko dan tidak stabil sehingga dapat berakibat pada kegagalan pelunasan. Kedua, insentif yang

¹ Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), hlm. 9-10.

diterima oleh lembaga keuangan formal (bank) untuk meminjamkan uang kepada UMKM tidaklah besar. Karena jumlah pinjaman yang kecil, biaya pemrosesannya relatif menjadi tinggi dibandingkan dengan jumlah pinjaman.²

Masalah akses kepada perbankan dalam memperoleh pinjaman diperburuk oleh kenyataan bahwa kebanyakan UMKM dikelola oleh orang-orang kurang berpendidikan, sehingga pengetahuan mereka tentang lembaga keuangan formal kurang yang mengakibatkan tidak adanya keberanian untuk mendekati lembaga keuangan formal tersebut untuk meminta bantuan keuangan.³

Permasalahan permodalan sementara kurangnya akses perbankan bagi UMKM harus dicarikan solusi/alternatif pemecahannya. Melalui program *linkage* dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BPRS, BMT dan koperasi berbasis syariah. *Linkage* program salah satu cara mendorong intermediasi untuk memberdayakan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Linkage* program merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing LKMS sekaligus efisiensi pelaksanaan skim pembiayaan bank syariah. Selain itu *Linkage* program menjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara bank syariah dengan LKMS dalam hal penyaluran pembiayaan kepada UMKM.⁴

² *Ibid.*, hlm. 13-14.

³ Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), hlm. 15.

⁴ Deddy Edward Tanjung, "Linkage Program untuk membantu UMKM", 29 Maret 2010, diakses dari <http://sumbermodal.wordpress.com/2010/03/29/linkage-program-untuk-membantu-umkm/>, pada tanggal 30 September 2011 pukul 10:00 WIB.

Seperti yang sudah dilakukan BMI Cabang pekalongan. Bank Muamalat Indonesia sangat mendukung pengembangan UMKM, hal itu bisa dilihat dari portofolio pembiayaan UMKM sebesar 70%. Bank Muamalat Indonesia menargetkan pembiayaan tersebut karena BMI ingin sektor riil bisa berjalan dengan baik, apalagi di sektor tersebut ribuan pelaku usaha mulai kecil dan menengah menggantungkan hidupnya.⁵ Namun BMI Cabang Pekalongan tidak menyalurkan pinjaman atau pembiayaan mikro secara langsung, tetapi pembiayaan tersebut akan disalurkan lewat program *linkage* dengan LKMS BMT.⁶ Tujuannya untuk mempercepat pencapaian *business plan* pembiayaan BMI Cabang Pekalongan kepada UMKM, untuk mengatasi keterbatasan jaringan dan Sumber Daya Manusia BMI dalam menjangkau usaha mikro secara langsung di pedesaan. Sementara itu bagi LKMS BMT, *linkage* program dapat mengatasi hambatan kesulitan modal kerja yang diperlukan dalam penyaluran kredit.⁷

Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan akan bekerja sama dengan LKMS BMT dalam hal permodalan dengan memberikan pembiayaan kepada LKMS BMT untuk menambah modal kerja/usaha LKMS BMT yang

⁵ Media Expose, "Bank Muamalat Komitmen di Pembiayaan UMKM", 23 November 2010, <http://www.pkesinteraktif.com/bisnis/perbankan-syari'ah/2099-bank-muamalat-komitmen-di-pembiayaan-umkm.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2011 pukul 13:45 WIB.

⁶ <http://esharianomics.com/news/indonesia/bank-muamalat-tak-salurkan-pembiayaan-mikro-langsung/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2011 pukul 10:45 WIB.

⁷ Deddy Edward Tanjung, "Linkage Program untuk membantu UMKM", 29 Maret 2010, diakses dari <http://sumbermodal.wordpress.com/2010/03/29/linkage-program-untuk-membantu-umkm/>, pada tanggal 30 September 2011 pukul 10:00 WIB.


selanjutnya dana atau modal tersebut harus disalurkan ke para pengusaha mikro kecil dan menengah.⁸

Penyaluran pembiayaan ke LKMS BMT menggunakan sistem modal kerja dengan skim *mudharabah* atau bagi hasil atau *revenue sharing*. Melalui pembiayaan *mudharabah*, LKMS BMT akan dipenuhi kebutuhan modal kerjanya (100%), dan keuntungan yang diperoleh akan dibagihasilkan dengan tingkat nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama.⁹

Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas pembiayaan, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, termasuk di dalamnya pembiayaan bagi LKMS BMT. Meskipun LKMS BMT pada umumnya sudah berbadan hukum koperasi. Namun tidak tertutup kemungkinan akan timbul masalah, dana yang mestinya untuk disalurkan ke pedagang atau pengusaha kecil (*end user*) disalahgunakan, dipakai oleh pengurus LKMS BMT untuk keperluan pribadinya sendiri (terjadi *side streaming*). Hal ini bisa memicu kredit macet sehingga bisa merugikan pihak bank. Selain itu dalam penyaluran pembiayaan ke nasabahnya, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani (SDI) di LKMS BMT dalam melakukan analisa terhadap kelayakan sebuah debitur belum memadai. Kesalahan dalam menganalisa kelayakan debitur mendapatkan atau tidak suatu pembiayaan akan mempengaruhi rentabilitas LKMS BMT yang pada akhirnya

⁸<http://esharianomics.com/news/indonesia/bank-muamalat-tak-salurkan-pembiayaan-mikro-langsung/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2011 pukul 10:45 WIB.

⁹ Alihozi, "Berbagi Hasil/Mudharabah dengan LKMS (Bagian ke-2) Memahami Perbedaan Revenue Sharing dengan Profit & Loss Sharing", 30 April 2008, [Alihozi77.blogspot.com](http://alihози77.blogspot.com), diakses dari <http://alihози77.blogspot.com/2008/04/berbagi-hasil-mudharabah-dengan-lkms.html>, pada tanggal 26 Juli 2011 pukul 11:00 WIB.



mempengaruhi keuntungan yang diperoleh BMI Cabang Pekalongan. Oleh karena itu, sebelum permasalahan itu timbul, proses pemberian pembiayaan tidak berakhir setelah pembiayaan tersebut terealisasi/dicairkan, tetapi masih diperlukan pengawasan atau pemantauan jalannya pembiayaan sekaligus pembinaan agar pembiayaan yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan terhindar dari penyelewengan-penyelewengan. Bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip utama, yaitu: prinsip pencegahan dini (*early warning system*), prinsip pengawasan melekat (*built in control*) dan prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).¹⁰

Untuk itu dalam proposal ini penulis mengangkat judul “MEKANISME PENGAWASAN PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS BMT) DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEKALONGAN”. Adapun pemilihan judul di atas diantaranya adalah karena pembiayaan tersebut termasuk sektor pembiayaan yang penuh dengan resiko kerugian tinggi karena berpeluang mendatangkan kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Meskipun demikian, nilai NPF (*Non Performance Financing*) di BMI Cabang Pekalongan untuk pembiayaan bagi LKMS ini justru kecil.

¹⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. III (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm. 205.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara akademis

- Bagi akademik untuk menambah perbendaharaan pustaka sehingga dapat digunakan para pembaca sebagai tambahan informasi.
- Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai media informasi untuk mengetahui mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.

b. Secara praktis

Bagi penulis untuk menambah wawasan tentang mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.

D. Penegasan Istilah

Adapun penjelasan tentang penegasan istilahnya adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme

Cara kerja suatu organisasi (perkumpulan, dan sebagainya).¹¹

2. Pengawasan

Salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan (dalam hal ini pembiayaan) yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.¹²

3. Pembiayaan

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

¹¹ J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Cet.I (Jakarta: Buku Kompas, 2003), hlm. 222.

¹² Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1996), hlm. 462.

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

Menurut Prathama Raharja, memperoleh pembiayaan berarti memperoleh kepercayaan atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya. Maka diberikan uang, barang/jasa dengan syarat membayar kembali/memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan. Yang terpenting dalam praktik perbankan adalah penyerahan uang, karena uang merupakan pengganti barang/jasa dan telah luas digunakan. Dalam sehari-hari pembiayaan diartikan sebagai pinjaman.¹⁴

4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT)

LKMS BMT adalah sebutan ringkas dari *Baitul Maal wat Tamwil* atau Balai-usaha Mandiri Terpadu, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti

¹³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 12.

¹⁴ Prathama Raharja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 109.

dana zakat, infak dan shodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹⁵

E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan Tugas Akhir digunakan banyak referensi untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah dan selama proses pembuatan Tugas Akhir ini telah ditemukan buku-buku, karya ilmiah seperti tugas akhir dan lain-lain yang relevan tentang mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.

Referensi yang berasal dari buku atau makalah antara lain:

Dalam buku *Manajemen Syariah dalam praktik*, K.H Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung mengatakan pengawasan langsung di bank syariah boleh-boleh saja dilakukan. Jadi, begitu ada pengusaha yang mengajukan proposal dan disetujui untuk dibiayai, maka mekanisme kontrol agar pengusaha itu bertindak dengan benar, dikirimlah orang bank syariah untuk langsung duduk di manajemen perusahaan yang dibiayai itu.¹⁶

Dalam makalah yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Syariah* yang disusun oleh Muhammad Mujahidin mengatakan setelah pembiayaan terealisasi/dicairkan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar kekayaan bank syariah

¹⁵ Afriyandi, "Sekilas Mengenai Model Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat", diakses dari <http://www.emicsyariah.com/2010/06/sekilas-mengenal-model-lembaga-keuangan.html>, pada tanggal 26 Juli 2011 pukul 10:30 WIB.


¹⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 163.

akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan dan untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. Media pemantauan bisa berupa informasi dari dalam dan luar bank syariah, misalnya meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan, memeriksa adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi, kunjungan pada peminjam untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam.¹⁷

Referensi dari hasil penelitian (Tugas Akhir) antara lain:

Dalam Tugas Akhir yang berjudul *Analisis Pemberian Pembiayaan di BMT Nurus Sa'adah Tirto* yang disusun oleh Aini Maghfiroh mengatakan bahwa pengawasan yang digunakan di BMT Nurus Sa'adah adalah pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan pengawasan *on the spot* yaitu di tempat usaha para debitur, sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang timbul. Sementara pengawasan pasif dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan nasabah seperti laporan keadaan keuangan (dari neraca dan rugi/laba), laporan penyaluran keuangan (dari mutasi rekening pinjaman), laporan aktivitas (dari keadaan stok dan perkembangan usaha) dan sebagainya. Sejalan dengan tugas pengawasan adalah langkah *approach* dan bimbingan terhadap debitur. Artinya melakukan pengawasan pembiayaan dengan sekaligus mengadakan *approach* serta bimbingan, dalam rangka

¹⁷ Muhamad Mujahidin, "Manajemen Pembiayaan Syariah", Mujahidinimeis wordpress, diakses dari <http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/>, pada tanggal 30 Januari 2011 pukul 13:25 WIB.



pembinaan nasabah. Nasabah perlu dibina agar usahanya maju, berkembang, sehingga ia akan dapat memenuhi kewajibannya secara baik. Ini berarti memperlicin jalan pencapaian rentabilitas BMT dan amannya fasilitas BMT.¹⁸

Dalam Tugas Akhir yang berjudul *Implementasi Pengawasan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan* yang disusun oleh Chaerul Muhajirin mengatakan secara spesifik pengertian pengawasan pembiayaan selaras dengan pengertian pengawasan dalam arti luas. Dapatlah dijadikan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Adapun pengawasan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri antara lain dengan melihat tingkat *collectibility* yaitu penggolongan tingkat kelancaran pembiayaan kewajiban nasabah yang diukur berdasarkan jumlah hari tunggakan. Pengunjungan secara berkala, angsuran bulanan nasabah apakah tepat atau menunggak, apabila mengalami tunggakan atau angsuran kurang lancar maka bank melakukan pencegahan dini agar tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah. Laporan keuangan bila diperlukan untuk melihat apakah mengalami laba atau

¹⁸ Aini Maghfiroh, *Analisis Pemberian Pembiayaan di BMT Nurus Sa'adah* (Pekalongan: Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah, Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2007), hlm. 36-37.

rugi pada tiap bulannya, selama jangka waktu pembiayaan dan untuk memastikan kebenaran laporan keuangan yang diberikan.¹⁹

Berbeda dengan buku, makalah dan hasil penelitian di atas, penulis dalam Tugas Akhir meneliti Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan dari segi yang memfokuskan pada mekanisme pengawasan pembiayaan bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT). Pengawasan yang dimaksud adalah setelah realisasi pembiayaan yang mana belum pernah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai permasalahan ini.

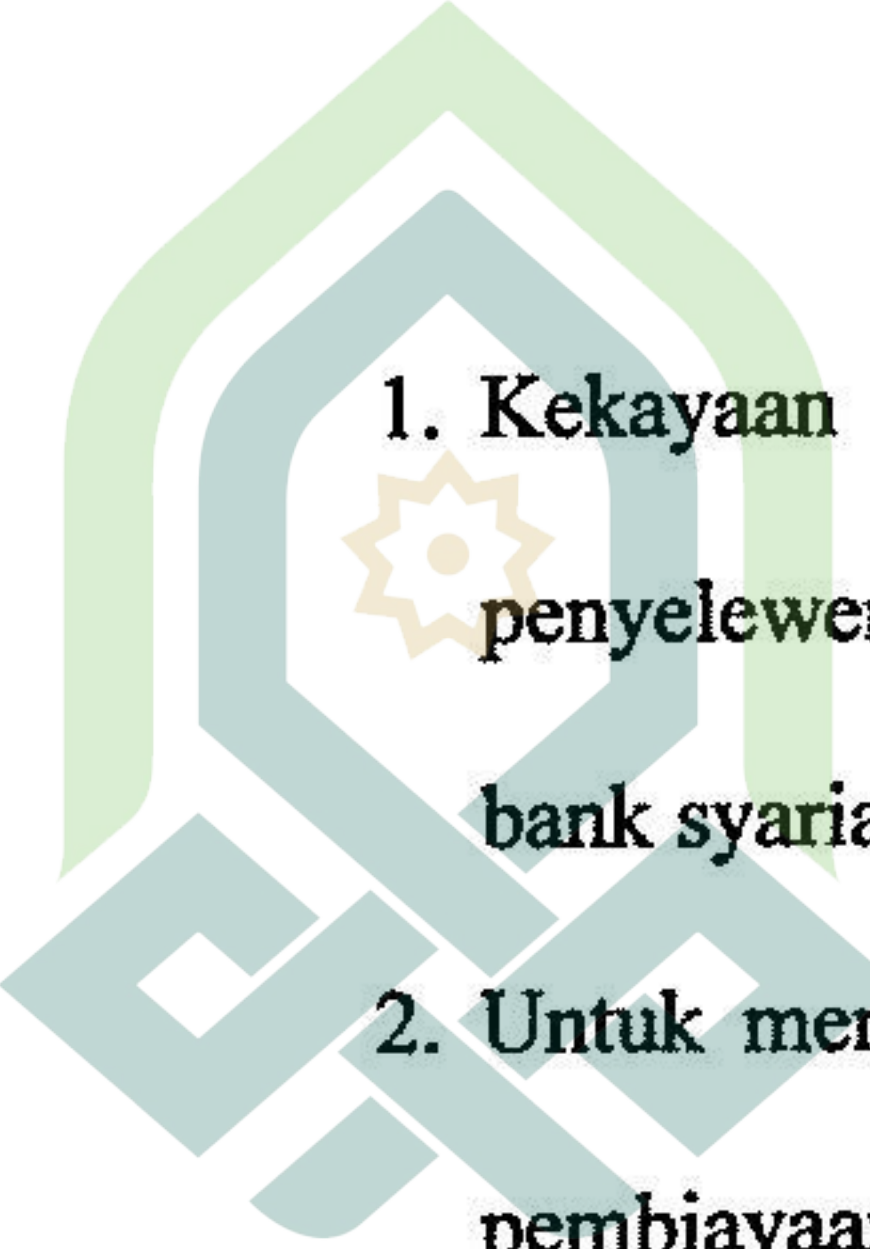
F. Kerangka Teori

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan, dan dapat mengetahui *terms of lending* serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan.²⁰

Aktivitas pemantauan dan pengawasan memiliki aspek dan tujuan tertentu, diantaranya:

¹⁹ Chaerul Muhajirin, *Implementasi Pengawasan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan* (Pekalongan: Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah, Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2009), hlm. 50-54.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 265.

- 
1. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syariah.
 2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
 3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
 4. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.²¹

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan resiko yang tidak saja dapat merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip utama, yaitu: prinsip pencegahan dini (*early warning system*), prinsip pengawasan melekat (*built in control*) dan prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).

Pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan, atau terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat. Pencegahan dini dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang andal, sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-peluang

²¹ *Ibid.*, hlm. 266.

penyimpangan, dan alat untuk mendeteksi adanya penyimpangan, sehingga dapat segera diluruskan kembali.

Di samping struktur pengendalian internal, diperlukan pengawasan melekat, di mana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan.

Hasil kegiatan supervisi itu minimal berupa laporan-laporan tentang :

1. Hasil penilaian kualitas portofolio pembiayaan secara menyeluruh, disertai dengan penjelasannya.
2. Ada atau tidaknya pembiayaan yang dilakukan menyimpang dari kebijakan pokok pembiayaan, ketentuan syariah, atau peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Besarnya tunggakan pembayaran kembali pembiayaan yang telah diberikan dan pembayaran bagi hasilnya.

Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah memenuhi prinsip-prinsipnya yang sehat, serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan. Fungsi audit internal ini dijalankan oleh bagian yang independent, yaitu Satuan Kerja

Audit Intern (SKAI), Di atas itu semua bank harus memiliki personel yang kompeten, jujur, dan bertanggungjawab.²²

G. Metode Penelitian

1. Desain penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian lapangan (*field research*) dengan studi pustaka artinya data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil dari berbagai sumber dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari studi pustaka.²³


b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa, gambar, dan bukan angka pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁴

²² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. III (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm. 205-206.

²³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6.



Dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis adalah :

a. Sumber data primer

Adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas yaitu terkait dengan mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan ibu Anni Asyfiati, selaku staf/karyawati Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan dan Bapak Sugiarto, selaku manajer/pengurus BMT yang memperoleh pembiayaan dari BMI Cabang Pekalongan.

b. Sumber data sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yaitu diperoleh lewat pihak lain, bukan dari subyek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang

telah tersedia, serta arsip-arsip resmi yang mendukung dan terkait tentang mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan²⁵

3. Metode Pengumpulan Data.

a. Wawancara atau *interview*

Adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.²⁶

Dalam teknik ini peneliti bertanya dengan pihak-pihak dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan maupun dari pihak LKMS BMT yang memperoleh pembiayaan dari BMI Cabang Pekalongan, terkait dengan permasalahan tentang mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan ibu Anni Asyfiati, selaku staf/karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan dan Bapak Sugiarto, selaku manajer/pengurus BMT yang memperoleh pembiayaan dari BMI Cabang Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dengan gambar, tulisan, atau lain-lain. Dalam hal ini data-data yang diambil berupa arsip-arsip tentang mekanisme

²⁵ Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1980), hlm. 171.

pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.²⁷

4. Metode Analisis Data

Dari semua data yang sudah terkumpul, maka untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya dalam pengambilan kesimpulan menggunakan analisis data sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode induktif adalah suatu metode pembahasan yang berkaitan dengan fakta atau peristiwa konkret atau khusus kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian umum. Dengan kata lain bahwa metode induktif yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, terkait tentang masalah penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*) dalam pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) yang dapat menyebabkan kredit macet atau pembiayaan bermasalah dan bertitik pada pengetahuan khusus itu akan digunakan untuk menilai sesuatu yang umum tentang pentingnya mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.²⁸

Dengan metode ini penulis mengungkapkan mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.

²⁷ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 118.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 10.


H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka penulis Tugas Akhir ini akan membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub yang menguraikan isi bab, yang mana antara bab I sampai dengan bab terakhir merupakan uraian yang berkesinambungan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan berisi tentang : Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori berisi tentang : Tinjauan umum tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah/LKMS BMT (meliputi: Pengertian LKMS BMT, ciri-ciri LKMS BMT, alasan pendirian LKMS BMT, proses pendirian LKMS BMT), tinjauan umum tentang pembiayaan (meliputi: definisi dan landasan syariah pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan), tinjauan umum tentang pengawasan (meliputi : pengertian pengawasan pembiayaan, dasar hukum pengawasan pembiayaan, fungsi dan tujuan pengawasan pembiayaan, proses dan jenis pengawasan pembiayaan).

Bab III : Gambaran umum Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan berisi tentang : Sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan, visi dan misi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan, lokasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan, jenis-jenis produk dan layanan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan,



struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan, proses pelaksanaan pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.

Bab IV : Analisis mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan, berisi tentang konsep penyaluran pembiayaan bagi LKMS BMT di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan, tujuan dan manfaat pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan, mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan.

Bab V : Penutup, berisi tentang : Simpulan dan saran-saran setelah melakukan penelitian dan menyusun tugas akhir ini.

Daftar pustaka yaitu bahan-bahan yang dijadikan referensi oleh penulis dari beberapa buku dan literatur yang terkait dengan materi penelitian.

Lampiran-lampiran berisi tentang beberapa daftar gambar dan daftar tabel yang terkait dengan objek dan materi penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait mekanisme pengawasan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan tidak menyalurkan pembiayaan UMKM-nya secara langsung, tetapi pembiayaan tersebut disalurkan lewat program *linkage* dengan LKMS. Program *linkage* adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan. Jadi, BMI Cabang Pekalongan mengeluarkan pembiayaan ke sektor riil (UMKM) secara tidak langsung. Pembiayaan ini disalurkan lewat perusahaan mitra (*two steps financing*). Perusahaan mitra yang menjadi *partner* BMI Cabang Pekalongan berupa Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Melalui program *linkage* ini, selain untuk mempercepat pencapaian *business plan* pembiayaan bank kepada UMKM, juga dapat mengatasi hambatan kesulitan modal kerja yang diperlukan baik yang dihadapi UMKM sebagai *end user* maupun bagi LKMS BMT dalam menyalurkan kreditnya, sehingga LKMS BMT tersebut bisa berkembang. *Linkage* program menjadi kerjasama yang

3. Proses pemberian pembiayaan bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di BMI Cabang Pekalongan tidak berakhir setelah pembiayaan tersebut terealisasi/dicairkan, tetapi masih diperlukan pengawasan atau pemantauan jalannya pembiayaan agar pembiayaan yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan terhindar dari penyelewengan-penyelewengan (deviasi) yang dilakukan oleh debitur. Karena keuntungan yang diperoleh BMI sangat tergantung sekali dengan tingkat keuntungan LKMS yang diberi pembiayaan. Pengawasan pembiayaan yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan adalah dengan cara; Melihat tingkat *collectability*, *monitoring*, dengan melakukan *inspeksi on the spot*, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat perusahaan/kegiatan usaha nasabah. Tujuannya untuk secara langsung melihat/mengetahui keadaan usaha nasabah serta perkembangannya dan juga sekaligus untuk dapat memberikan saran-saran pembinaan kepada debitur apabila ada problem-problem yang dihadapinya. Meminta laporan berkala, bisa laporan keuangan atau realisasi kerja, dan sebagainya. Serta memeriksa apakah pada tanggal-tanggal pelunasan dapat dipenuhi oleh nasabah. Apabila nasabah tidak mengangsur tepat waktu atau mengalami tunggakan, maka dilakukan pendampingan langsung ke nasabah, sehingga bank tahu yang masih bisa diangsur oleh nasabah tersebut berapa, sehingga bisa dilakukan revisi angsuran.

B. SARAN-SARAN

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang banyak menyerap tenaga kerja namun mengalami kesulitan dalam hal permodalan, untuk itu perlu dukungan dari semua pihak agar usaha tersebut bisa tumbuh dan berkembang sehingga menjadi usaha besar, termasuk dukungan dari lembaga keuangan (perbankan). Namun tidak semua bank menyalurkan pembiayaan langsung ke UMKM. Lewat perpanjangan tangan LKMS BMT, BMI Cabang Pekalongan membantu memenuhi permodalan tersebut melalui pembiayaan yang disalurkan. Agar pembiayaan tersebut bisa dimanfaatkan dan dinikmati secara maksimal oleh para pengusaha UMKM, sebaiknya porsi persentase untuk pembiayaan tersebut harus selalu ditingkatkan seiring bertambahnya pelaku UMKM serta menjamurnya berbagai LKMS. Pemberian pembiayaan tersebut tentunya harus disertai dengan pengawasan yang memadai agar pembiayaan tersebut benar-benar tersalurkan ke UMKM, tanpa disalahgunakan oleh pengurus LKMS BMT.
2. Sebagian besar kredit macet terjadi akibat lemahnya pengawasan bank terhadap debitur setelah cairnya kredit baik itu dalam hal penggunaan dana maupun kondisi usaha pasca kredit cair. Biasanya rata-rata pihak bank dalam hal ini petugas bank lebih *concern* kepada debitur yang sudah menunggak, sedangkan debitur yang masih aman dalam hal pembayarannya ditinggalkan tidak diperdulikan. Padahal dengan menjaga hubungan dengan debitur setelah pencairan kredit akan meminimalisir resiko penyalahgunaan pinjaman yang akan menyebabkan kredit tersebut macet nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Anwar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet III.

Arsyad, Lincolin. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Azwar, Saifudin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Badudu, J. S. 2003. *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas, Cet. I.

BPRS PNM Al-Ma'some. 2004. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung: BPRS Al-Ma'soem.

Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hasil Semiloka Nasional dengan Judul "Pengembangan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bagi UMKM dan Pengawasannya, pada tanggal 24-25 Juni 2003 di Jakarta

Kartono, Kartini. 1980. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Percetakan Offset Alumni.

Maghfiroh, Aini. 2007. *Analisis Pemberian Pembiayaan di BMT Nurus Sa'adah*. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Modul, Pembiayaan Bermasalah Penyebab dan Cara Penanggulangannya,
Muamalat Institut, hlm.1.

Moleong, J. Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.

Muhajirin, Chaerul. 2009. *Implementasi Pengawasan Pembiayaan Murabahah di
Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan*. Pekalongan: Perpustakaan
STAIN Pekalongan.

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muljono, Teguh Pudjo. 1996. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*.
Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Raharja, Pratama. 1990. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana,
Cet. I.

Umar, Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 12.

Veithzal, Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. *ISLAMIC BANKING: Sebuah Teori,
Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz. 2009. *Manajemen Operasional Bank
Syariah*. Cirebon: STAIN Press.

Sumber dari Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Ibu Anni Asyfiati, Bagian AM Lending Wilayah Timur BMI Cabang Pekalongan, tanggal 22 Juli 2011.

Hasil wawancara dengan Bapak Sugiarto, Manajer LKMS BMT yang memperoleh pembiayaan dari BMI Cabang Pekalongan, tanggal 31 Oktober 2011.


Sumber dari Internet

Afriyandi (2010). "Berbagi Hasil dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)". *From* <http://alihози77.blogspot.com/2008/04/berbagi-hasil-dengan-lembaga-keuangan.html>, 26 Juli 2011.

Afriyandi (2010). "Mengetahui KJKS BMT". *From* <http://www.emicsyariah.com/2010/06/mengetahui-kjks-bmt.html>, 26 Juli 2011.

Afriyandi (2010). "Sekilas Mengenai Model Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat". *From* <http://www.emicsyariah.com/2010/06/sekilas-mengenai-model-lembaga-keuangan.html>, 26 Juli 2011.

Alihozi (2008). "Berbagi Hasil/Mudharabah dengan LKMS (Bagian ke-2) Memahami Perbedaan Revenue Sharing dengan Profit & Loss Sharing". *From* <http://alihози77.blogspot.com/2008/04/berbagi-hasil-mudharabah-dengan-lkms.html>, 26 Juli 2011.



Alihozi (2008). "Kerjasama Bank Umum Syariah dengan LKMS Untuk Memberdayakan Ekonomi Ummat : Peluang dan Hambatan". *From* <http://alihozi77.blogspot.com>, 30 September 2011.

Data-data yang diambil resmi dari situs Bank Muamalat Indonesia dengan alamat website: www.muamalatbank.com dan atas seijin dari Bank Muamalat, diakses pada tanggal 19 Maret 2011.

Deddy Edward Tanjung (2010). "Linkage Program untuk membantu UMKM". *From* <http://sumbermodal.wordpress.com/2010/03/29/linkage-program-untuk-membantu-umkm/>, 30 September 2011.

Muamalat Institute (2011). "Training Analisa Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah BPRS dan LKMS". *From* <http://www.stumbleupon.com/su/26ytwr/www.muamalat-institute.com/home/beranda/37-news/383-training-analisa-pembiayaan-dan-pembiayaan-bermasalah-bprs-a-lkms.html>, 30 September 2011.

NN. "Bank Muamalat tak Salurkan Pembiayaan Mikro Langsung". *From* <http://esharianomics.com/news/indonesia/bank-muamalat-tak-salurkan-pembiayaan-mikro-langsung/>, 26 Juli 2011.

Media Expose (2010). "Bank Muamalat Komitmen di Pembiayaan UMKM". *From* <http://www.pkesinteraktif.com/bisnis/perbankan-syariah/2099-bank-muamalat-komitmen-di-pembiayaan-umkm.html>, 30 Januari 2011.

Muhamad Mujahidin (2010). "Manajemen Pembiayaan Syariah". *From* <http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/>, 30 Januari 2011.

Tony Hidayat. "Linkage Program Solusi Pembiayaan Bagi Hasil". *From*

<http://www.islamicbank.multiply.com>, 30 September 2011.


Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzhal. "ISLAMIC FINANCIAL
MANAGEMENT: Pengawasan Pembiayaan". *From*

<http://images.fkeiuii.multiply.multiplycontent.com>, 30 Januari 2011.



No.	Pengarang	Judul	Metodologi	Narasi	Perbedaan
1	K.H Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung	Manajemen Syariah dalam Praktik	Menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan sebuah fenomena atau peristiwa yang terkait dengan permasalahan	Mengatakan pengawasan langsung di bank syariah boleh-boleh saja dilakukan. Jadi, begitu ada pengusaha yang mengajukan proposal dan disetujui untuk dibiayai, maka mekanisme kontrol agar pengusaha itu bertindak dengan benar, dikirimlah orang bank syariah untuk langsung duduk di manajemen perusahaan yang dibiayai itu.	Dalam praktiknya mungkin tidak semua bank syariah menerapkan apa yang sudah dikemukakan oleh K.H Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, untuk itu perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal tersebut. Hal itulah yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang.
2	Muhammad Mujahidin	Manajemen Pembiayaan Syariah	Menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan sebuah fenomena atau	Mengatakan setelah pembiayaan terealisasi/dicairkan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya	Hal tersebut menurut ilmu dan konsep, dalam praktiknya mungkin berbeda. Itulah yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana bank melakukan pengawasan terhadap



			<p>peristiwa yang terkait dengan permasalahan</p>	<p>penyelewengan-penyelewengan. Media pemantauan bisa berupa informasi dari dalam dan luar bank syariah, misalnya meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan, memeriksa adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi, kunjungan pada peminjam untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam.</p>	<p>pembiayaan, apakah sudah memadai atau belum.</p> 
3	Aini Maghfiroh	<p>Analisis Pemberian Pembiayaan di BMT Nurus Sa'adah</p>	<p>Menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan sebuah fenomena atau</p>	<p>Mengatakan pengawasan yang digunakan di BMT Nurus Sa'adah adalah pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan pengawasan <i>on the spot</i> yaitu di tempat usaha para debitur. Sementara pengawasan pasif dilakukan</p>	<p>Berbeda dengan apa yang penulis angkat, studi kasus yang penulis lakukan di Lembaga Perbankan bukan di BMT. Bank dan BMT memang sama-sama lembaga keuangan yang fungsinya sama-sama menghimpun dana dari masyarakat</p>



		Tirto	peristiwa yang terkait dengan permasalahan	<p>melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan nasabah seperti laporan keadaan keuangan (dari neraca dan rugi/laba), laporan penyaluran keuangan (dari mutasi rekening pinjaman), laporan aktivitas dan sebagainya. Sejalan dengan tugas pengawasan adalah langkah <i>approach</i> dan bimbingan terhadap debitur. Artinya melakukan pengawasan pembiayaan dengan sekaligus mengadakan <i>approach</i> serta bimbingan, dalam rangka pembinaan nasabah. Nasabah perlu dibina agar usahanya maju, berkembang, sehingga ia akan dapat memenuhi kewajibannya secara baik.</p>	<p>(<i>funding</i>) yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat (<i>financing</i>) dalam bentuk pembiayaan. Akan tetapi ruang lingkungnya berbeda. Ruang lingkup bank lebih besar dan kompleks dibandingkan BMT, sehingga manajemen bank pun akan berbeda dengan BMT, termasuk manajemen pengawasan pembiayaannya.</p>
4	Chaerul	Implementasi	Menggunakan jenis	Mengatakan pengawasan dapatlah dijadikan	Berbeda dengan judul yang penulis



Muhajirin	Pengawasan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan	pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan sebuah fenomena atau peristiwa yang terkait dengan permasalahan	salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Adapun pengawasan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri antara lain dengan melihat tingkat <i>collectability</i> yaitu penggolongan tingkat kelancaran pembiayaan kewajiban nasabah yang diukur berdasarkan jumlah hari tunggakan. Pengunjungan secara berkala angsuran bulanan nasabah apakah tepat atau menunggak. Apabila mengalami tunggakan atau angsuran kurang lancar maka bank melakukan pencegahan dini agar tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah.	angkat. Penulis dalam hal ini lebih memfokuskan dari segi mekanisme pengawasannya yaitu pada pembiayaan bagi LKMS BMT. Di samping itu studi kasusnya berbeda yaitu di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan. Sementara Chaerul Muhajirin mengadakan penelitiannya di Bank Syariah Mandiri. Setiap bank tentunya mempunyai mekanisme tersendiri yang dianggapnya paling baik.
-----------	---	---	--	--

untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

an yang diajukan : Rp. Pengajuan : Baru Perubahan Take Over

in (dijelaskan) :

DATA PRIBADI PEMOHON

Jenis Kelamin : Laki Perempuan
 Status : Belum Menikah Menikah Janda/Duda
 Jumlah Tanggungan :
 Pendidikan terakhir :

Wilayah : Kode Pos : Lama tinggal di alamat ini :
 gal : Pribadi Keluarga Sewa/Kontrak Dinas Lainnya (sebutkan)
 mendadak hubungi (yang tidak serumah) :

Telp. : Wilayah : Kode Pos :
 ak menghubungi anda : di Rumah pukul : di Kantor, pukul :

Wilayah : Kode Pos :

DATA PEKERJA	DATA SUAMI/ISTRI
Nama :	Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :	Tempat/Tanggal Lahir :
(Jika bekerja)	
Nama Perusahaan :	Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :	Bidang Usaha :
Pangkat/Jabatan :	Pangkat/Jabatan :
Mulai bekerja sejak :	Mulai bekerja sejak :
Alamat kantor :	Alamat kantor :
Telp. :	Telp. :
Wilayah :	Wilayah :
Kode Pos :	Kode Pos :

DATA KEUANGAN	PINJAMAN LAIN
/ bulan permohonan : Rp.	Nama Kreditur
/ bulan Suami/Istri : Rp.	Jenis Pinjaman / Credit Card
han (Jika ada) : Rp.	Jumlah Pinjaman
eluaran per bulan : Rp.	Jatuh Tempo
aman lainnya / bulan : Rp.	
ersih : Rp.	

DATA KEKAYAAN	SIMPANAN / REKENING DI BANK
Jumlah	Nama Bank
Lokasi / Merk	Jenis Simpanan
Nilai Rp.	a/n
	Nomor

DATA JAMINAN

TANAH RUMAH TINGGAL RUKO BPKB

Wilayah : Kode Pos : Merk Kendaraan :
 Type : Sedan Minibus Lainnya :
 Tahun : Warna :
 No. IMB : Harga Kendaraan :
 B / Hak Milik Ni : a/n : Uang Muka :
 Nama Dealer :
 Alamat/Telp Dealer :
 ninan / Penjamin :
 ga :
 aminan :
 Wilayah : Kode Pos : Klasifikasi PERUSAHAAN Pemerintahan : BUMN Swasta

REFERENSI

2. Nama :
 Perusahaan :
 Posisi / Jabatan :
 Alamat/Telp :

bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengijinkan untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada bank untuk memotong dari rekening / deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak menyetujui / onan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Suami/Istri Penjamin
 (Nama / TTD) (Nama / TTD)

Ik In Referal Soficit IBP Kode Cabang/Capem/Kt. Kas : Kode Officer :

Perpustakaan IAIN Pekalongan

No 801 / BMI-PKL / X / 2011

Pekalongan, 13 Dzulq'adah 1432 H
12 Oktober 2011 M

SURAT KETERANGAN

Assalaamualaikum Wr. Wb.

Bersama ini PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Pekalongan menerangkan bahwa :


Nama : Meisila Lintang Riyana
Nim : 231.208.062
Program Studi : D3 Perbankan Syariah


Telah melakukan Penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul **"Mekanisme Pengawasan dalam Pembiayaan bagi lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS BMT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan"** pada bulan pada periode Juli-September 2011.

Demikian hal ini kami sampaikan, terima kasih.

Wassalaamualaikum Wr. Wb.

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
CABANG PEKALONGAN


Irawaty
Branch Manager


Munindar Afitri
Alt. Operation Manager

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Meisila Lintang Riyana

NIM : 231 208 062

Tempat, Tanggal Lahir: Pekalongan, 9 Mei 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kubang Logandeng RT. 06 RW. 03 No. 59 Karangdadap
Pekalongan

Data Orang Tua

Ayah : Kusmiri

Pekerjaan : Perangkat Desa

Ibu : Khotimah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kubang Logandeng RT. 06 RW. 03 No. 59 Karangdadap
Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. MI Wali Songo Logandeng lulus tahun 2002
2. MTs N Buaran Pekalongan lulus tahun 2005
3. SMA N 1 Kedungwuni lulus tahun 2008
4. STAIN Pekalongan Program Studi D III Perbankan Syariah masuk tahun 2008, lulus tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup penulis yang mana hal tersebut penulis terangkan dengan sebenar-benarnya.


Meisila Lintang Riyana

231 208 062